



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FAJAR HUSIN**
2. Jabatan : **ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**
3. NHK : **427971**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.332.960.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 312 m2/150 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 231.150.000
2. Tanah Seluas 448 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 89.600.000
3. Tanah Seluas 736 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 66.240.000
4. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 54.000.000
5. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/132 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , WARISAN Rp. 315.450.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/112 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , WARISAN Rp. 144.720.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 1922 m2/90 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, WARISAN Rp. 374.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **85.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU AYLA MINI BUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000



2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA SPD MTR SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 14.000.000

| | | |
|--|-----|----------------------|
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 519.000.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | --- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 722.943.023 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | --- |
| Sub Total | Rp. | 2.659.903.023 |
| III. HUTANG | Rp. | --- |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 2.659.903.023 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.